

Artikel Penelitian

## Peran BPJS Kesehatan dalam Menanggapi Perubahan Struktur Pekerjaan di Era Globalisasi Ekonomi

Gema Rahmadani<sup>1\*</sup>, Mustafa Kamal Rokan<sup>2</sup>, Ibnu Affan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia

<sup>2</sup> S3 Hukum Islam, Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 20 Januari 2025  
Revisi Akhir: 02 Februari 2025  
Diterbitkan Online: 20 Februari 2025

### KATA KUNCI

BPJS Kesehatan  
Pekerja  
Ekonomi

### KORESPONDENSI (\*)

Phone: +62 852-7655-0095  
E-mail: gemagemapsr1000@gmail.com

### A B S T R A K

Globalisasi ekonomi telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan semakin meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal dan gig economy. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial, terutama terkait dengan akses layanan kesehatan bagi pekerja. BPJS Kesehatan, sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, berperan penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Namun, dengan semakin banyaknya pekerja lepas dan pekerja migran yang tidak terdaftar dalam hubungan kerja formal, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan merata. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana BPJS Kesehatan beradaptasi dengan dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel dan bagaimana sistem jaminan kesehatan ini dapat memperluas cakupannya untuk melindungi pekerja informal, pekerja lepas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, tulisan ini juga membahas tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam memperbaiki kualitas layanan dan memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di tengah perubahan global. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan di Indonesia, terutama dalam menghadapi dampak dari globalisasi ekonomi terhadap dunia kerja.

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi, struktur pekerjaan di dunia, termasuk Indonesia, mengalami perubahan signifikan. Globalisasi telah membuka pasar tenaga kerja internasional yang semakin terintegrasi, memunculkan berbagai jenis pekerjaan baru yang bersifat lebih fleksibel dan serba digital. Pekerja tidak lagi terbatas pada hubungan kerja formal dengan perusahaan besar, tetapi juga banyak yang terlibat dalam pekerjaan lepas (freelance), kontrak, dan gig economy. Fenomena ini, meskipun memberikan kemudahan dan peluang ekonomi baru, juga menciptakan tantangan dalam hal perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja, terutama terkait dengan akses kesehatan. BPJS Kesehatan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, BPJS Kesehatan juga diatur dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.

Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menjadi salah satu pilar utama dalam sistem jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan, yang awalnya diperuntukkan bagi pekerja formal, kini harus menghadapi tantangan besar dalam melayani segmen pekerja yang tidak terikat pada hubungan kerja formal, seperti pekerja informal dan pekerja lepas. Pekerja dalam sektor-sektor ini seringkali tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai, termasuk jaminan kesehatan, yang mengakibatkan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

Dengan semakin berkembangnya *gig economy* dan pekerja migran, BPJS Kesehatan dituntut untuk memperluas cakupannya, mengadaptasi sistem yang ada, dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja non-formal, dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang setara. Oleh karena itu, adaptasi kebijakan BPJS Kesehatan menjadi isu penting, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi yang menciptakan ketidakpastian dalam hubungan kerja dan status pekerja. Selain itu, perubahan dalam kebijakan ketenagakerjaan juga turut mempengaruhi cara BPJS Kesehatan beroperasi. Pemerintah Indonesia, dalam rangka menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan, telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem jaminan sosial melalui program BPJS Kesehatan. Namun, tantangan utama tetap terletak pada bagaimana mencakup pekerja yang terabaikan dari segi perlindungan kesehatan, serta bagaimana BPJS Kesehatan bisa menjawab kebutuhan pekerja di era globalisasi yang semakin terfragmentasi ini. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana BPJS Kesehatan berperan dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi, serta bagaimana sistem jaminan kesehatan ini dapat terus berkembang untuk memastikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh pekerja di Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak besar terhadap perubahan struktur pekerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan mobilitas tenaga kerja, digitalisasi, dan berkembangnya sektor *gig economy* menjadi beberapa fenomena utama yang mempengaruhi cara kerja dan pola hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Struktur pekerjaan yang semakin fleksibel ini, meskipun menawarkan berbagai peluang, juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. (Arah, E. :2019).

Dalam konteks ini, BPJS Kesehatan berperan penting sebagai instrumen negara dalam memastikan setiap warga negara, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan. BPJS Kesehatan yang awalnya diperuntukkan bagi pekerja formal kini dihadapkan pada tantangan untuk memperluas cakupan ke pekerja di sektor informal dan pekerja lepas yang semakin berkembang seiring dengan perubahan struktur pasar kerja akibat globalisasi.

Peran BPJS Kesehatan tidak hanya terbatas pada perlindungan kesehatan dasar bagi pekerja formal, tetapi juga pada upaya untuk menjawab tantangan yang muncul dalam memenuhi kebutuhan kesehatan bagi mereka yang bekerja di sektor non-formal, termasuk pekerja *gig* dan pekerja migran. Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional, BPJS Kesehatan harus mampu beradaptasi dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah, serta memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan tetap inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari status pekerjaan mereka. (Arah, E.:2019).

Tulisan ini akan membahas bagaimana BPJS Kesehatan berperan dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, serta bagaimana kebijakan ketenagakerjaan dan sistem jaminan kesehatan di Indonesia beradaptasi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan lepas. Dalam analisis ini, juga akan dibahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam mewujudkan akses kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif* untuk menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan di era globalisasi ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena secara mendalam dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi BPJS Kesehatan dalam konteks perubahan pasar tenaga kerja di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Pendekatan Kualitatif**

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena sosial secara lebih mendalam dan menyeluruh, terutama dalam konteks perubahan struktur pekerjaan yang dipengaruhi oleh globalisasi. Penelitian ini lebih fokus pada pemahaman tentang perubahan tersebut dalam konteks ekonomi global, bukan hanya untuk mengukur angka atau statistik, tetapi untuk memahami makna dan implikasi sosial yang ada di balik fenomena tersebut.

## 2. Jenis Data

Data Sekunder: Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui literatur dan dokumen-dokumen akademik yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk menggambarkan tren dan pola globalisasi ekonomi serta dampaknya terhadap struktur pekerjaan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas dampak globalisasi terhadap sektor pekerjaan di berbagai negara.
- Studi kasus dari sektor-sektor tertentu (seperti pertanian, manufaktur, dan ekonomi digital) yang menunjukkan contoh nyata perubahan struktur pekerjaan akibat globalisasi.

## PEMBAHASAN

### *Perubahan Struktur Pekerjaan akibat Globalisasi Ekonomi*

Globalisasi ekonomi telah mengubah cara dan pola kerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Terjadinya transformasi dari sektor industri ke sektor jasa, serta perkembangan pesat teknologi digital, telah mendorong munculnya jenis pekerjaan baru yang lebih fleksibel, seperti pekerja lepas (freelancer), pekerja kontrak, dan pekerja gig economy. Fenomena ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam hubungan kerja, mengingat banyak pekerja yang tidak terdaftar secara formal dalam sistem jaminan sosial.

Di satu sisi, sektor informal di Indonesia, yang mencakup pekerja lepas, pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima, dan sektor lainnya, terus berkembang pesat. Meskipun mereka berkontribusi besar terhadap ekonomi, mereka seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan yang awalnya dirancang untuk pekerja formal harus menghadapi tantangan besar dalam memperluas cakupannya untuk melindungi kelompok pekerja ini.

### *Peran BPJS Kesehatan dalam Menyikapi Perubahan Struktur Pekerjaan*

BPJS Kesehatan sebagai lembaga jaminan kesehatan nasional memiliki mandat untuk menyediakan akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks perubahan struktur pekerjaan akibat globalisasi, BPJS Kesehatan berperan dalam dua aspek utama:

1. Ekspansi Cakupan untuk Pekerja Informal: Pemerintah melalui BPJS Kesehatan telah berupaya untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi pekerja informal dengan memberikan opsi kepesertaan mandiri bagi mereka. Program BPJS Kesehatan Mandiri menjadi solusi untuk pekerja non-formal, meskipun tantangan utama tetap terletak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi pekerja informal dalam mendaftar.
2. Inovasi Program untuk Pekerja Gig Economy: Pekerja gig economy, yang sering kali terabaikan dalam sistem jaminan sosial, membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel. Beberapa inisiatif telah dicoba untuk menjangkau pekerja gig, seperti kemudahan dalam pendaftaran dan pembayaran iuran secara periodik. Meski demikian, program ini masih menghadapi tantangan besar dalam menarik minat pekerja gig yang memiliki pola kerja yang tidak tetap.

### *Tantangan yang Dihadapi BPJS Kesehatan*

Dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan perubahan struktur pekerjaan, BPJS Kesehatan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan:

1. Kepesertaan yang Tidak Merata: Meskipun BPJS Kesehatan telah menyediakan akses bagi pekerja informal dan pekerja lepas, partisipasi mereka dalam program ini masih terbilang rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang manfaat jaminan kesehatan, biaya iuran yang dianggap mahal oleh sebagian kalangan, serta ketidakpastian status pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja lepas.
2. Tantangan Keberlanjutan Pembiayaan: Dengan semakin banyaknya peserta baru dari sektor informal dan pekerja gig, BPJS Kesehatan menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan yang berkelanjutan. Pekerja yang tidak terdaftar dalam perusahaan formal sering kali memiliki penghasilan yang tidak tetap, sehingga sulit untuk memastikan kelancaran pembayaran iuran secara konsisten.

3. **Kualitas Layanan Kesehatan:** BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan bagi peserta, khususnya bagi pekerja yang berada di daerah-daerah terpencil atau yang bekerja dengan status tidak tetap. Perbedaan dalam kualitas fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi isu yang perlu segera diselesaikan.

### ***Solusi dan Upaya Perbaikan BPJS Kesehatan***

Agar BPJS Kesehatan dapat menjawab tantangan-tantangan di atas, beberapa solusi dan langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi:** Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu mengencangkan sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan, terutama kepada pekerja informal dan pekerja gig economy. Program edukasi yang lebih intensif akan membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam BPJS Kesehatan.
2. **Inovasi Pembayaran dan Fleksibilitas Iuran:** BPJS Kesehatan perlu menyesuaikan mekanisme pembayaran iuran agar lebih fleksibel dan terjangkau, terutama bagi pekerja dengan pendapatan yang tidak tetap. Penyesuaian iuran berdasarkan kemampuan bayar dan opsi pembayaran yang lebih fleksibel bisa menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal.
3. **Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Layanan Kesehatan:** Untuk menjangkau lebih banyak pekerja, BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil dan memastikan standar pelayanan yang merata di seluruh Indonesia. Kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan swasta dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses.

### ***Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung BPJS Kesehatan***

Selain upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung program jaminan kesehatan ini. Pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif bagi pekerja informal, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang mengikutsertakan pekerja gig dalam program jaminan sosial, atau kebijakan yang memberikan akses kesehatan bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam sistem formal.

### ***Pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan menjadi salah satu isu penting dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia.***

Meskipun Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mewajibkan setiap pekerja di Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, untuk terdaftar dalam sistem jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan, masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan tersebut. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (2018).”Mengatur penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dan memberikan gambaran tentang kewajiban BPJS Kesehatan dalam melayani seluruh warga negara.”

Beberapa alasan mengapa pekerja tidak didaftarkan oleh perusahaan antara lain adalah . (Siahaan, F.: 2020).

#### **1. Kurangnya Kepatuhan Perusahaan**

Beberapa perusahaan, terutama yang berskala kecil atau menengah, mungkin tidak sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Kesehatan. Alasan ini sering kali berkaitan dengan masalah biaya yang dianggap membebani perusahaan, meskipun sebenarnya BPJS Kesehatan menawarkan banyak manfaat bagi baik pekerja maupun pemberi kerja.

#### **2. Status Pekerja yang Tidak Jelas**

Di era gig economy, semakin banyak pekerja yang terlibat dalam pekerjaan kontrak, paruh waktu, atau freelance, di mana hubungan kerjanya sering kali tidak jelas dan formal. Pekerja semacam ini tidak selalu diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan karena tidak terdaftar sebagai karyawan tetap dalam perusahaan. Hal ini menyebabkan mereka terlewatkan dari perlindungan kesehatan yang diberikan oleh BPJS.

#### **3. Tingkat Kepatuhan dan Pengawasan yang Lemah**

Meskipun ada peraturan yang mewajibkan pendaftaran pekerja ke dalam BPJS Kesehatan, pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lapangan seringkali kurang maksimal. Tidak jarang ditemukan perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dalam mendaftarkan pekerja, dan pekerja tersebut juga tidak menyadari hak mereka untuk mendapatkan jaminan Kesehatan.

Ada beberapa contoh nyata yang di alami beberapa pekerja di perusahaan, dan penulis berhasil wawancarai salah satu pekerja bahkan membantu untuk mengkonfirmasi ke pihak yang bersangkutan yaitu pada BPJS Kesehatan. Bahwa pihak Perusahaan menyampaikan pada pekerja selain menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pekerja juga di daftarkan pada BPJS Kesehatan dengan peringkat kelas III, tentu akan dipotong dari gaji setiap bulannya sekitar 45.000,- akan tetapi kenyataan yang terjadi, Perusahaan malah mendaftarkan BPJS Kesehatan beberapa pekerja ke Dinas Sosial yang tidak membayar atau gratis, hal ini terjadi saat pekerja mencoba ingin memperbaharui datanya ke BPJS Kesehatan, namun pihak BPJS Kesehatan mengecek bahwa pekerja yang bersangkutan penerima bantuan dari Dinas Sosial sehingga pekerja diarahkan untuk merubah data ke dinas sosial bukan BPJS Kesehatan. Adapun pendaftaran BPJS Kesehatan ke dinas social melalui perangkat desa (kepling, kelurahan atau kepala desa), artinya tentu saja pekerja merasa dirugikan karena fasilitas Kesehatan yang diberikan ternyata gratis tetapi pekerja tersebut harus menerima potongan gaji setiap bulan. Dari kejadian ini penulis menyimpulkan bahwa tidak semua Perusahaan taat pada aturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

## KESIMPULAN

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak signifikan terhadap struktur pekerjaan di Indonesia, dengan semakin banyaknya pekerja yang terlibat dalam sektor informal, gig economy, dan pekerjaan lepas. Perubahan ini memunculkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial, terutama terkait dengan jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan, sebagai program jaminan kesehatan nasional, berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan adalah memastikan bahwa pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan, seperti pekerja lepas, kontrak, atau pekerja migran, tetap memperoleh perlindungan kesehatan. Meskipun BPJS Kesehatan telah menyediakan mekanisme pendaftaran mandiri, kesadaran yang rendah dan kesulitan dalam pembayaran iuran menjadi hambatan utama. Selain itu, banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban untuk mendaftarkan pekerja juga menambah kompleksitas masalah ini.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu terus berupaya meningkatkan kesadaran, menyediakan inovasi dalam sistem pendaftaran dan pembayaran, serta memperketat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan. Selain itu, kemudahan akses bagi pekerja informal dan gig economy, seperti fleksibilitas pembayaran iuran dan penggunaan platform digital untuk pendaftaran, menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh pekerja, tanpa terkecuali, mendapatkan jaminan kesehatan yang mereka butuhkan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan BPJS Kesehatan dapat semakin inklusif dan responsif terhadap dinamika perubahan struktur pekerjaan yang terjadi akibat globalisasi ekonomi, serta memberikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh pekerja di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arah, E. (2019). Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Struktur Pekerjaan di Indonesia: Implikasi Terhadap Jaminan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Ketenagakerjaan*, 18(2), 101-118.
- Chahaya, R. & Wulandari, L. (2021). Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan oleh Pekerja Non-Formal: Analisis Hambatan dan Solusi. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 119-132
- Prakoso, R. D. (2021). Dampak Gig Economy terhadap Perlindungan Sosial Pekerja di Indonesia: Peran BPJS Kesehatan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 12(3), 250-263.
- Siahaan, F. (2020). *Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia: Permasalahan dan Solusi*. Pustaka Ketenagakerjaan, Jakarta.
- Soejono, S. (2022). *Kebijakan Kesehatan Global dan Implikasinya di Indonesia: Panduan Jaminan Sosial dan Kesehatan*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2023). *Rencana Strategis BPJS Kesehatan 2024-2029*.
- Mulyani, I. & Rahmawati, S. (2020). Dampak Globalisasi terhadap Perlindungan Kesehatan Pekerja di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(1), 67-80.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (2004).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (2018).
- BPJS Kesehatan. (2023). *Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2023*.